

New Media & Komunikasi Politik

(Telaah Kontestasi Politik dalam Ruang *New Media*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

New Media & Komunikasi Politik
(Telaah Kontestasi Politik dalam Ruang *New Media*)

Editor : Didik Haryadi Santoso

New Media & Komunikasi Politik

(Telaah Kontestasi Politik dalam Ruang New Media)

@Penulis

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

250 hal (x + 240 hal), 14 cm x 21 cm

ISBN: 978-602-52470-0-2

Penulis :

Christiany Juditha, Kheyene Molekandella Boer,
Lidwina Mutia Sadasri, Rosalia Prismarini Nurdiarti,
Arif Kusumawardhani, Rani Dwi Lestari, Astri Wulandari
Primada Qurrota Ayun, Ressi Dwiana,
M. Nastain, Didik Haryadi Santoso.

Editor :

Didik Haryadi Santoso,

Perancang Sampul :

Achmad Oddy.W

Penata Letak :

Ibnu T.W

Cetakan Pertama, 2018

Diterbitkan oleh:

Mbridge Press

Jl. Ringroad Utara, Condong Catur, Depok,
Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
Lab. Multipurpose, Lantai 2 Kampus III UMBY
Hp. 081324607360

Kata Pengantar Editor

Era *new media* melahirkan banyak perubahan-perubahan, baik positif maupun negatif, *plus-minus*, disamping kemampuan dan kelebihan yang dimilikinya. Kemampuan dan kelebihan dari *new media* ini dapat dilihat dari kecepatannya yang dapat memangkas ruang dan waktu, meskipun secara akurasi masih rendah. Mengenai daya jangkau misalnya, daya jangkau *new media* tidak hanya dapat lokal melainkan global, atau gabungan keduanya glokal, global-lokal sebagaimana istilah Van Dijk. *New media* mampu melakukan mediasi ulang terhadap ragam dimensi-dimensi kehidupan termasuk kehidupan politik. Dalam terminologi David Bolter dikenal istilah *remediation*, saat dimana realitas empirik dimediasi ulang oleh teknologi hingga melahirkan sebuah realitas baru. Realitas empirik bergeser menjadi realitas virtual, identitas empirik berubah bentuk menjadi identitas virtual. Identitas tidak lagi berbentuk kesatuan melainkan bergeser menjadi *liquid identity*, sebuah identitas yang cair sebagaimana yang diutarakan oleh Antony Giddens.

Remediasi digital melalui *new media* mengantarkan kita pada perubahan-perubahan dalam berinteraksi dan berkomunikasi, termasuk di bidang politik. Perubahan itu tidak hanya tentang bagaimana perubahan perilaku aktor politik, melainkan juga meliputi konten, audien atau konstituen, hingga pola-pola interaksi yang terjadi didalamnya. Cara aktor dan

audien dalam berkomunikasi juga berubah dari *face to face communication* bergeser pada tipe komunikasi yang termediasi. Pertarungan isu dan wacana pun tidak dapat dihindarkan. Hingga pada akhirnya, tidak sedikit yang menimbulkan ragam persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Buku ini berupaya membuka berbagai macam problematika yang berkaitan dengan *new media* dan komunikasi politik yang terjadi belakangan ini dan saat menjelang pemilihan presiden dan atau pemilihan kepala daerah. Didalam buku ini dibahas tentang bagaimana *buzzer* dan *black campaign* di media sosial, kekuatan interaksi pada media sosial dalam men-dikte arus komunikasi politik indonesia, selebriti politik & media spectacle. Selanjutnya juga dibahas tentang bagaimana isu pencalonan presiden menjelang pilpres 2019 melalui meme politik di media sosial, belunggu bilik gema, bias media & perilaku netizen, self plagiarism pada pemberitaan politik di media online, serta dibahas pula tentang bagaimana pertarungan tagar dan identitas virtual pada *new media*. Pada bagian-bagian akhir, buku ini membicarakan dinamika yang terjadi pada pemilihan kepala daerah. Tulisan berjudul “*meme politik sebagai informasi politik dalam pilkada DKI Jakarta di media sosial*” dan “*kampanye berbasis sara di pemilukada Sumatera Utara*” serta “*politik jaringan & hegemoni kekuasaan dalam pentas politik lokal*”, merupakan tulisan yang fokus tentang dialektika politik di daerah. Terakhir, tulisan berjudul “*new media, new politics*” yang membahas tentang bagaimana praktik *political celebrity* menjadi tulisan penutup dalam buku ini.

Melalui buku ini, para penulis tidak hanya mengeksplorasi problematika komunikasi politik secara gamblang melainkan juga berupaya memberikan catatan-catatan kritis dan reflektif atas permasalahan yang belakangan ini terjadi. Buku ini dapat dijadikan referensi, tidak hanya bagi para mahasiswa atau

akademisi melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk para aktor politik, serta masyarakat luas secara umum yang tertarik dengan telaah-telaah mengenai komunikasi politik pada *new media*. Semoga buku ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai *new media* dan komunikasi politik. Akhir kata, selamat membaca!

Yogyakarta, 7-7-2018

Didik Haryadi Santoso

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Editor.....	v
<i>Buzzer</i> di Media Sosial: Antara <i>Marketing Politik</i> dan <i>Black Campaign</i> dalam Pilkada <i>Christiany Juditha</i>	1
Kekuatan Interaksi pada Media Sosial dalam Men-Dikte Arus Komunikasi Politik Indonesia <i>Kheyene Molekandella Boer</i>	25
Selebriti Politik dan <i>Media Spectacle</i> : Kajian <i>Media Spectacle</i> pada Isu Teror & Presiden RI Joko Widodo <i>Lidwina Mutia Sadasri</i>	39
Membaca Isu Pencalonan Presiden Menjelang Pilpres 2019 Melalui Meme Politik di Media Sosial <i>Rosalia Prismarini Nurdiarti</i>	61
Diantara Belenggu Bilik Gema, Bias Media & “Maha Benar” <i>Netizen</i> dengan Segala Postingannya <i>Arif Kusumawardhani</i>	89
<i>Self Plagiarism</i> pada Pemberitaan Politik di <i>Media Online</i> dalam Perspektif Etika Jurnalistik <i>Rani Dwi Lestari</i>	115
#Tagar, Ruang Publik & Identitas Virtual <i>Astri Wulandari</i>	141
Meme Politik sebagai Informasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta di Media Sosial <i>Primada Qurrota Ayun</i>	157

Kampanye Berbasis Sara di Pemilukada Sumatera Utara	
<i>Ressi Dwiana</i>	175
Politik Jaringan & Hegemoni Kekuasaan dalam Pentas Politik Lokal	
<i>M. Nastain</i>	199
<i>New Media, New Politics?</i>	
<i>Didik Haryadi Santoso</i>	215
Biodata Penulis	233

Politik Jaringan & Hegemoni Kekuasaan dalam Pentas Politik Lokal

M. Nastain

Pendahuluan

Politik selalu memantik nalar kritis dan analisis kebanyakan orang. Betapapun pelik dan kisruh dinamika di dalamnya, semua menaruh perhatian besar untuk melihat dan memberikan penilaian baik setuju ataupun tidak setuju. Bukan hari ini saja fenomena sadar politik menjangkiti hampir semua elemen masyarakat. Perkembangan politik dari masa ke masa memang bergeser kepada kesadaran publik akan pentingnya turut serta dalam pertarungan politik. Tidak perlu dirisaukan berada pada tingkatan mana, keterlibatan dalam isu politik sudah memberikan rasa puas apalagi jika dibarengi dengan penanaman ideologi yang kuat dari partai politik.

Partisipasi publik dalam ruang-ruang politik pasca reformasi semakin menunjukkan peningkatan dibuktikan dengan tumbuhnya partai politik baru. Meningkatnya pertumbuhan partai politik tentu linier dengan keterlibatan publik. Syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang menuntut adanya keterlibatan publik dengan membuat kepengurusan sampai tingkat ranting¹. Menurut Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses

¹ Undang-undang Pemilu

pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*)².

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ditangan rakyat (dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat), terimplementasi dalam sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum di Indoensia pasca reformasi, pemilihan kepala daerah dilakukan dengan pemilihan langsung sebagai tanda matinya era “kekuasaan mencari orang” beralih pada era “orang mencari kekuasaan”. Era ini menuntut adanya keterlibatan publik secara aktif dan massif karena menjadi penguasa ditentukan oleh kuantitas pemilih.

Elektabilitas atau tingkat keterpilihan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah dengan penguasaan jaringan dan hegemoni kekuasaan dengan menempatkan sebanyak mungkin publik sebagai dominasi kuasa yakni hubungan patron klien. Penguasaan jaringan berbincang tentang bagaimana menghidupkan mesin-mesin politik baik yang sifatnya formal (terdaftar secara resmi sebagai lembaga dibawah partai) maupun nonformal (tidak terdaftar resmi tetapi memiliki afiliasi yang kuat). Piranti untuk menggerakkan kepentingan tersebut biasanya dengan uang dan bantuan materiil sampai pada transaksi “posisi” bagi para tokoh tetapi disembunyikan dengan berbagai penanaman ideologi dan semangat perjuangan. Dramaturgis politik selalu mengemuka menjelang kontetasi politik baik secara lokal maupun dalam skala nasional.

Hegemoni kekuasaan merupakan relasi antara penguasa dengan publik atau lebih tepatnya antara patron dengan

² Herbert McClosky, “Political Participation”, International Encyclopedia of the Social Sciences, ed. Ke-2 (New York: The Macmillan Company, 1972), XII, hlm. 252

klien. Dimana sebagian publik menjadi elemen kunci yang bisa digerakkan untuk kepentingan patron. Klien mengelola kepentingannya dan menyembunyikannya dalam kepentingan-kepentingan umum dan menjejali klien dengan berbagai macam propaganda yang bahwa pada ujungnya adalah menjamin eksistensi kekuasaan patron. Narasi politik dalam hegemoni kekuasaan lebih banyak menguntungkan patron dan hanya menyisakan sedikit nilai tambah bagi public sebagai klien. Merujuk pada teori Pareto bahwa hegemoni kekuasaan membagi keuntungan politik 80 persen bagi patron dan 20 persen bagi klien. Atau dalam bahasa yang lain untuk mendapatkan keuntungan politik patron hanya menggunakan 20 persen sumber daya yang dimiliki sedangkan klien menggunakan 80 persen sumber daya untuk mendapatkan 20 persen keuntungan politik.

Pilkada Jawa Tengah sebagai kontestasi politik lokal memiliki sensitifitas yang sama dengan kontestasi politik ditingkat nasional. Setelah pertarungan di Banten dan Jakarta maka tahun 2018 pertarungan bergeser di berbagai daerah salah satunya Jawa Tengah. Menilik ketatnya persaingan pilkada Jakarta bukan tidak mungkin suhu politik yang sama juga akan terjadi di Jawa Tengah. Berdasarkan observasi berbagai mesin politik dalam bentuk ormas sudah dipanaskan dan sumbunya sudah dipantik sejak awal 2017. Dalam analisis kritis dipercaya bahwa manusia bergerak berdasarkan kepentingan begitu pula dalam politik setiap gerakan selalu memiliki kepentingan politik meski berbagai dalih disematkan untuk mengelabui publik.

Dengan budaya politik seperti dipaparkan diatas maka kekuasaan hanya akan menjadi milik orang tertentu dan dari kelompok tertentu. Bahkan yang lebih miris adalah seperti yang dikatakan oleh Antonio Gramsci bahwa penguasa datang silih berganti tetapi publik tetap pada posisi yang sama. Artinya

bahwa pergiliran kekuasaan tidak memiliki dampak apapun pada peningkatan kesejahteraan publik. Praktik politik jaringan dan hegemoni kekuasaan akan menjadi fokus penelitian yang pada akhirnya dapat memberikan pendidikan politik kepada publik dan membangkitkan kesadaran politik. Bertolak dari data dan fakta di atas, penelitian ini mengerucut pada sebuah rumusan masalah: Bagaimana Fenomena Sosial Politik Jaringan dan Hegemoni Kekuasaan Dalam Pentas Politik Lokal Pilkada Jawa Tengah 2018?

Politik Jaringan: Antara Makna & Wacana

Politik harus dimaknai sebagai sebuah entitas yang memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik dan berkeadilan. Karena dalam sejarahnya politik dipenuhi dengan dua posisi dominan antara kemenangan dan kekalahan, kesengsaraan dan kesejahteraan. Namun demikian, pengertian politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*), dan alokasi atau distribusi kekuasaan (*allocation or distribution power*)³.

Peter Merkl menambahkan bahwa politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan yang baik dan berkeadilan (*Politics, at its best in a noble quest for a good order and justice*)⁴. Sebuah tatanan yang baik dan adil tidak dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal salah satu diantaranya adalah zaman. Indonesia pasca reformasi merubah sistem politik dan demokrasi dengan melakukan pilihan langsung sebagai representasi demokrasi

³ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka, 2014), h. 14-15

⁴ Peter H. Merkl, *Continuity and change* (New York, Harper and Row, 1976), h. 13

yang adil dan jujur. Tatanan ini dinilai lebih dekat dengan nilai-nilai leadilan karena memberikan kesempatan kepada siapapun untuk beradu peruntungan dalam kompetisi politik. Meskipun demikian dalam perjalanannya banyak ditemukan kekurangan. Sistem pemeliharaan langsung atau era orang mencari kekuasaan banyak ditemukan praktik politik uang, politik jaringan dan hegemoni kekuasaan oleh orang-orang kuat secara finansial dan garis keturunan. Sehingga mereka yang tampil dalam panggung politik didominasi oleh orang dengan latar belakang finansial dan garis keturunan yang kuat.

Dalam merebut dan mempertahankan posisi politik berbagai strategi digunakan. Strategi optimalisasi jaringan menjadi pilihan yang paling relevan karena memiliki daya yang kuat dan jangkauan yang luas. Jaringan tidak selalu dibincang sebagai sesuatu yang harus dibentuk oleh aktor politik secara pribadi, dapat juga merupakan optimalisasi jaringan yang sudah tersedia. Misalkan bagaimana hari ini badan otonom dibawah Nahdhlatul Ulama (NU) aktif digunakan sebagai media politik oleh beberapa pihak. Jaringan ini secara massif digerakkan dengan berlandaskan kekuatan ideologi yang sudah tertanam secara mapan.

Fenomena politik jaringan memang bukan sesuatu yang baru karena pada hakikatnya politik hanyalah pengulangan episode sejarah dengan tokoh yang berbeda. Tokoh-tokoh sebelumnya juga menggunakan cara yang sama karena dukungan public dalam jumlah yang banyak merupakan kekuatan utama dalam sistem demokrasi. Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana sistem politik jaringan ini hanya melanggengkan kekuasaan bagi pribadi dan kelompok tertentu tanpa memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat sebagai pengusung (jaringan).

Kekuasaan dan Hegemoni

Kekuasaan oleh Foucault di introduksi menjadi nuansa baru sebagai sesuatu yang positif dan produktif, kemudian menyebar dalam ruang-ruang lokal. Namun yang harus diakui bahwa ketika kekuasaan menyebar maka segalanya menjadi tercakup dalam kekuasaan⁵. Dalam pandangan ilmuwan kelahiran perancis 1926 ini, kekuasaan tidak dimaknai sebagai “kepemilikan” melainkan dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup tertentu⁶. Kekuasaan tidak dipahami sebagai sesuatu yang menindas melainkan produktif, kekuasaan menyusun wacana, pengetahuan, benda-benda dan subjektifitas⁷.

Kekuasaan selalu teraktualisasikan melalui pengetahuan, dan pengetahuan selalu memiliki efek kuasa. Kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaannya, karena hampir tidak mungkin kekuasaan tidak ditopang dengan ekonomi politik kebenaran⁸. Oleh Foucault kebenaran tidak dipahami sebagai sesuatu yang datang dari langit, bukan juga sebuah konsep yang abstrak. Akan tetapi ia diproduksi, setiap kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran sendiri melalui mana khalayak digiring untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan⁹.

“Truth is the world; it is produced there by virtue of multiple constrain. Each society has its regime of truth; its general politics of truth: that is the types of discourse it harbours and causes to function as true: the mechanisms and instances which enable one to distinguish true from false statements, the way in which each is

⁵ Listiyono Santoso, dkk, *Epistemologi Kiri*, (Yogyakarta: Ar Ruzz, 2003), h. 189

⁶ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar analisis teks media*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), h. 65-67

⁷ Marianne W Jorgensen dan Louise J. Phillips, Penerjemah Imam Suyitno dkk, *Analisis Wacana : Teori dan Metode*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 25

⁸ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar analisis teks media*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), h. 66

⁹ *Ibid*, h. 67

*sanctioned; the techniques and procedures which are valorised for obtaining truth: the status of those who are changed with saying what count as true*¹⁰.

Kekuasaan disalurkan melalui hubungan sosial dimana memproduksi bentuk- bentuk kategori perilaku sebagai baik atau buruk. Sebagai bentuk pengendalian perilaku. Relasi sosial itulah yang memproduksi bentuk subjektifitas dan perilaku. Jadi khalayak ditundukkan bukan dengan kontrol yang bersifat langsung dan fisik melainkan dengan wacana dan mekanisme berupa prosedur, aturan dan tatacara¹¹.

Dari deskripsi diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, kekuasaan dalam konsep Foucault bukanlah milik melainkan sebuah strategi seseorang, kelompok atau berupa gagasan dan produksi teks. Oleh karena itu ,kekuasaan bukan kepemilikan melainkan dipraktikkan. Kedua, kekuasaan tidak bekerja melalui represi, negatif, struktur yang menindas melainkan ia hadir melalui peraturan, regulasi, norma yang tidak memaksa melalui fisik. Ketiga, kekuasaan tidak bisa dilokalisir melainkan ia berada dimana-mana. Artinya kekuasaan hadir ketika peraturan, norma dan regulasi hadir dan ditegakkan¹².

Kekuasaan tidak bisa dilepaskan dari hegemoni. Menurut Gramsci hegemoni adalah jenis hubungan kekuatan sosial khusus yang kelompok-kelompok dominannya mengamankan posisi mereka atas hak-hak istimewa dengan cara sebagian besar melalui cara-cara konsensus¹³. Dalam literatur yang berbeda Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni adalah tentang cara

¹⁰ Sara Mills, *Discourse*, (london and New York: Routledge, 1997),h. 18

¹¹ Michael Foucault, *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern, Penyadur Petrus Sunu Hardiyanto*, (Yogyakarta: LkiS, 1997).

¹² Dudi Iskandar, *Representasi Kekuasaan dalam konflik KNPI*, (Jakarta: Tesis Mercu Buana, 2012),h. 27-28

¹³ Jenny Edkins and Nick V. Williams, *Teori-teori Kritis: Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Baca,2010),h. 234

menerapkan kekuasaan ideologi yang tidak terlihat. Hegemoni adalah tentang proses-proses yang melaluinya seperangkat ide milik satu kelompok sosial menjadi dominan dalam suatu masyarakat¹⁴.

Analisis dan Pembahasan

Kontesatsi kekuasaan dalam Pemilihan langsung kepala daerah menjadi sebuah perhelatan yang menyita perhatian public. Dalam skala nasional kemenangan di daerah menjadi tonggak kemenangan yang lebih besar dalam perebutan tahta kekuasaan pusat. Pilkada Jawa Tengah menjadi salah satu kontestasi yang menarik. Dalam pertarungan nasional kemenangan di Jawa Tengah menjadi salah satu kartu As untuk dapat memudahkan langkah memenangi kontestasi nasional.

Selain menarik dari sisi kepentingan eksternal, Pilkada Jawa tengah juga menarik dianalisis dari fenomena internal yang melahirkan budaya politik baru pasca reformasi yakni politik jaringan yang berbasis optimalisasi kader dan hegemoni kekuasaan yang didominasi oleh para borjuis politik. Masyarakat pada tingkat akar rumput hanya menjadi pendulang suara pengantar para borjuis mendapatkan kursi kekuasaan.

Kontestasi Perebutan Kekuasaan

Demokrasi sebagai sebuah system politik yang secara resmi dianut oleh Indonesia memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak bangsa untuk dipilih dan memilih dalam wadah pemilihan umum. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk menjadi “penguasa” dengan syarat mendapatkan amanah (memenangkan kontestasi pemilihan) dalam proses lima tahunan sesuai dengan amanah konstitusi. Seharusnya

¹⁴ Graeme Burton, *Media dan Budaya Populer*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2012),h.73

kekuasaan tidak hanya dimaknai sebagai kepemilikan kekuasaan semata melainkan sebagai kemampuan, otoritas dan legitimasi untuk menyusun dan membuat kebijakan publik (*public policy*).

Kontestasi perebutan kekuasaan menjadi semakin vulgar dan betul-betul menjadi komoditas adalah era pasca reformasi. Kita memasuki sebuah era dimana kran kekuasaan benar-benar dibuka dan semua elemen masyarakat diberikan akses penuh untuk menikmatinya, untuk berjuang dan bertarung didalamnya demi sebuah keinginan untuk berkuasa. Akan tetapi kontestasi yang secara idealis dikonsepsi untuk mencari sosok yang “pantas” dengan berbagai macam prasyaratnya harus tereduksi dengan praktik machiavelisme.

Ketika demokrasi bersentuhan dengan kapitalisme maka praktik kontestasi kekuasaan dengan berlandaskan kekuatan modal tidak dapat dihindarkan. Terasa sampai hari ini bahwa kontestasi kekuasaan di Indonesia masih didominasi oleh mereka yang kuat secara finansial. Borjuis politik mampu tampil didepan sebagai kontestan jika memang memiliki aksesibilitas dan elektabilitas yang tinggi. Jika mereka tidak memiliki prasyarat untuk dapat memenangkan hati konstituen mereka masih dapat berdiri dibelakang kontestan menjadi pemodal politik sehingga kepentingan mereka tetap dapat diakomodir.

Praktik politik dengan dominasi kapitalisme akan menjadi embrio lahirnya politik jaringan yang hanya menggunakan masyarakat sebagai kuda troya untuk berperang dan mendapatkan kekuasaan. Pemahaman mereka direduksi hanya sebagai orang kecil yang tidak memiliki akses cukup merengkuh jabatan tersebut. Hetherington (2001) dalam *Marekting Politik* Firmanzah mengatakan bahwa kebanyakan orang melihat bahwa berpolitik adalah urusan elite politik. Fenomena yang sama juga terjadi dalam pemilihan gubernur Jawa tengah 2018, dimana praktik politik jaringan yang mengeksploitasi

masyarakat sampai tingkat desa terjadi begitu massif. Pembentukan simpul-simpul tim sukses dan relawan kandidat merekrut masyarakat dari berbagai macam elemen. Ada tokoh masyarakat yang diharapkan mampu mengkooptasi masyarakat dengan pengaruhnya sampai elemen pemuda sebagai actor penyebaran informasi terkait kandidat. Politik jaringan tidak akan menyalahi aturan perundang-undangan karena memang sebuah praktik yang wajar dalam system politik. Yang menjadi persoalan adalah pasca kontestasi kekuasaan bisanya jaringan ditinggalkan begitu saja sampai lima tahun kedepan. Seolah keberadaan jaringan hanya sekedar transaksional. Seharusnya sebagai sebuah struktur dan bagian dari politik, jaringan semestinya dikelola, diedukasi dan memiliki system yang jelas dan terukur sehingga kesejahteraan mereka sebagai “orang partai” akan meningkat selaras dengan kandidat yang dibantu untuk menduduki jabatan.

Politik Jaringan dan Patron Klien

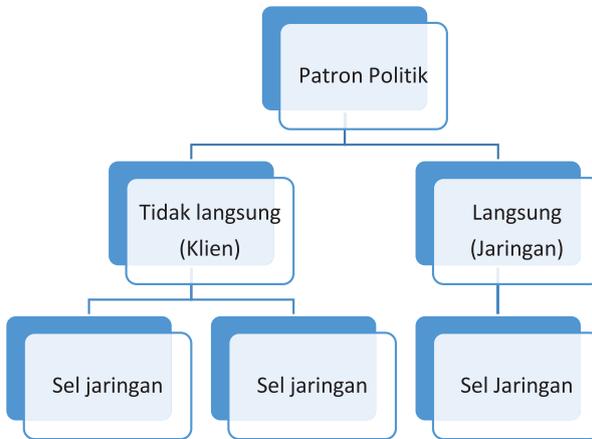
Demokrasi mensyaratkan keterlibatan masyarakat sebagai elemen kunci. Kontestasi diukur dengan seberap banyak suara yang diperoleh sehingga setiap kontestan harus mampu mendulang suara untuk menjadi pemenang. Dalam hal ini politik jaringan dan patron klien menjadi jawaban yang ideal dalam sebuah system dulang suara. Kontestan pilkada Jawa Tengah 2018 sudah sejak 2 tahun sebelum pilkada telah menyiapkan mesin-mesin politik. Dimulai dari menggerakkan ormas kepemudaan, mengelola komunitas local dan optimalisasi jaringan independen yang dipersiapkan pada posisi tertentu yang tidak dapat diakses oleh anggota partai.

Politik jaringan dalam kontestasi lokal tidak selalu berafiliasi dengan partai politik. Karena kandidat yang diusung akhir-akhir ini tidak selalu dari kader. Hal ini bukan karena tanpa alasan, banyak kader potensial tetapi tidak memiliki modal yang

cukup untuk memenangkan kontestasi. Sudah menjadi rahasia umum ketika demokrasi berdampingan dengan kapitalisme maka kemenangan dapat lebih mudah dicapai dengan modal yang kuat. Menurut KH. Damsiri selaku pengurus di DPC PPP Kabupaten Grobogan keberadaan politik jaringan dan bergesernya paradigma politik berbasis modal karena memang sudah menjadi era (genre) politik pasca reformasi. Budaya baru dalam politik Indonesia baik nasional maupun local banyak diisi oleh kontestan dengan modal yang kuat.

Pilkada Jawa tengah 2018 misalnya empat nama yang disodorkan oleh partai politik hampir semuanya bukan berangkat dari tingkat daerah melainkan sudah menjadi tokoh nasional. Ganjar Pranowo sebagai petahana kita ketahui sebagai politisi yang sudah malang melintang sebagai anggota DPR Pusat sebelum turun dalam gelanggang Pilkada periode yang lalu. Sudirman Said dan pasangannya Ida Fauziyah juga terasa asing dalam kontestasi local karena memang lebih banyak berkiprah pada tingkat pusat daripada daerah. Satu-satunya kontestan local dan berangkat dari daerah adalah Taj Yasin yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Propinsi.

Bukanlah sebuah kesalahan ketika politisi nasional turun gelanggang politik local, bahkan harapan yang disematkan ketika mereka telah terbiasa memikirkan konsep makro sebuah negara tentunya akan lebih mudah membangun konsep yang hanya sifatnya kedaerahan dengan territorial yang tidak terlalu luas. Dengan jaringan nasional yang dimiliki oleh kontestan Pilkada jateng 2018, maka politik jaringan dan patron klien yang bermainpun juga jaringan yang sifatnya nasional. Ormas kepemudaan nasional turut andil dalam politik jaringan pilkada Jateng 2018 dengan menempatkan anggota-anggotanya dalam jajaran tertentu yang tidak dapat diakses oleh anggota partai politik.



Gambar : Patron Klien dan Pembentukan Jaringan

Hubungan antara patron politik dengan jaringan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Jaringan yang bersifat langsung adalah jaringan yang secara langsung bertanggung jawab kepada patron politik misalkan tim sukses kandidat. Sedangkan jaringan tidak langsung adalah jaringan yang dikembangkan oleh klien politik untuk membantu kandidat. Kandidat tidak memiliki hubungan resmi kepada jaringan hanya memiliki kepentingan yang dikelola oleh klien

Hegemoni Kekuasaan

Hegemoni kekuasaan yang dimaksudkan disini bukanlah kekuasaan yang hanya dikuasai oleh satu orang melainkan sebuah sistem politik yang mengarah pada kekuasaan hanya akan bias direngkuh oleh satu golongan saja. Demokrasi yang sejatinya digadang-gadang sebagai fungsi kontrol kekuasaan agar tidak hanya dikuasai oleh golongan tertentu kini harus menghadapi persoalan yang sama. Ditengah mahalnnya ongkos politik maka menutup kemungkinan bagi rakyat kecil untuk dapat terpilih dalam pesta demokrasi.

Praktik hegemoni kekuasaan oleh borjuis politik sudah selayaknya menjadi issue yang harus segera diangkat ke permukaan. Hal ini beriringan dengan melemahnya kemampuan partai sebagai industri politik menghasilkan kader-kader yang kompetitif, kapabel sehingga memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi tanpa perlu modal besar. Kegagalan partai politik dalam memproduksi kader yang handal juga dinyatakan oleh KH. Damsiri selaku pengurus DPC PPP Kab. Grobogan. Bahkan lebih lanjut disampaikan bahwa kandidat paling potensial adalah kandidat yang memiliki modal kuat karena memiliki tingkat keterpilihan yang lebih besar. Realitasnya banyak kader bagus dengan integritas kuat harus mengalah karena keterbatasan modal politik.

Seperti adagium dalam politik bahwa “tidak ada yang abadi dalam politik”, begitu pula kekuasaan dengan sistem demokrasi yang harus berakhir dalam kurun lima tahunan. Mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan akan mencoba mempertahankan kekuasaan yang sudah dalam genggaman agar tidak terlepas. Praktik hegemoni kekuasaan adalah sebuah praktik yang cukup luas. Tidak sekedar mereka yang kuat secara finansial harus berdiri terdepan dalam kontestasi melainkan mereka terkadang cukup berdiri dibelakang memainkan bidak sesuai dengan kepentingan mereka. Sehingga muncul sebuah istilah “pemimpin boneka”, merujuk pada seseorang yang secara legitimasi menjadi seorang pemimpin tetapi pada hakikatnya hanyalah pesuruh sebagai perpanjangan kepentingan pemodal. Situasi ini menegaskan pemikiran Foucault bahwa kekuasaan tidak dimaknai sebagai “kepemilikan” melainkan dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup tertentu.

Hegemoni kekuasaan pada tingkat nasional menjadi cerminan dalam pentas local. Dimana praktik yang sama juga berlaku di daerah, dominasi orang-orang kuat selalu hadir dalam

kontestasi politik lokal. Seharusnya politik local diramaikan oleh politisi-politisi daerah yang lebih memahami daerah baik dari sisi budaya, social, potensi dan sebagainya. Dan juga sebagai rintisan karir politik pada jenjang yang lebih tinggi yakni tingkat nasional. Dengan kontestasi yang sistemik dan berjenjang maka daerah akan mampu melahirkan politisi-politisi yang handal sebagai penyuplai politisi nasional. Selain itu dengan fokus pada politisi lokal diharapkan mampu memberikan peluang bagi masyarakat yang memenuhi prasyarat menjadi pemimpin untuk muncul di permukaan.

Penutup

Pilkada Jawa Tengah 2018 sebagai pesta demokrasi tertinggi dalam kontestasi local menyuguhkan sebuah praktik politik yang patut untuk dikritisi. Bukan karena factor legalitas melainkan karena factor kepatutan politik dalam perubahan social. Masyarakat sebagai actor utama demokrasi hanya ditempatkan sebagai penyokong pesta demokrasi dan berfungsi mengantarkan seseorang menjadi perengkuh kekuasaan. Praktik politik jaringan yang tidak adil adalah ketika mereka yang menjadi pendukung kandidat tidak mendapatkan perhatian, manfaat dan kesejahteraan yang berbanding lurus dengan kandidat yang diantarkan. Politik jaringan sekedar menjadi politik transaksional yang hanya dirawat lima tahunan sekali demi syahwat jabatan.

Hegemoni kekuasaan menjadi kian langgeng karena sistem politik demokrasi yang bergandengan tangan dengan kapitalisme. Sehingga hanya pemodal besar (borjuis politik) yang mampu mengakses peluang kekuasaan baik sebagai actor didepan panggung maupun sebagai *invisible hand* yang bermain dibelakang panggung demi terjaganya kepentingan.

Daftar Pustaka

- Burton, Graeme, 2012, *Media dan Budaya Populer*, Yogyakarta: Jalasutra
- Edkins, Jenny and Nick V. Williams, 2010, *Teori-teori Kritis: Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional* Yogyakarta: Pustaka Baca
- Eriyanto, 2012, *Analisis Wacana Pengantar analisis teks media*, Yogyakarta: LKIS
- Herbert McClosky, Herbert, 1972 "Political Participation", *International Encyclopedia of the Social Sciences*, ed. Ke-2, (New York: The Macmillan Company
- Iskandar, Dudi, 2012, *Representasi Kekuasaan dalam konflik KNPI*, Jakarta: Tesis Mercu Buana
- Jorgensen W Marianne dan Louise J. Phillips, Pnerjemah Imam Suyitno dkk, 2007, *Analisis Wacana : Teori dan Metode*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Krisyantono, Rachmat, 2007, *Teknik Praaktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Listiyono Santoso, Listiyono, dkk, 2003, *Epistemologi Kiri*, Yogyakarta: Ar Ruzz
- Merkel, Peter H, 1976, *Continuity and change*, New York, Harper and Row
- Michael Foucault, Michael, 1997, *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern*, Penyadur Petrus Sunu Hardiyanto, Yogyakarta: LkiS
- Mills, Sara, 1997 *Discourse*, london and New York: Routledge
- Miriam Budiarjo, Miriam, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Biodata Penulis

Christiany Juditha



Peneliti Madya di Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menempuh Pendidikan S1 di Fisip Universitas Hasanuddin Makassar, jurusan Ilmu Komunikasi dan S2 di Fisip Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, jurusan Ilmu Komunikasi dan Media. Beberapa

karya tulis ilmiah adalah “Hatespeech di Media Online: Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017” dimuat di Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik 21 (2) 2017; “Memahami Struktur Jaringan Media Sosial sebagai Cara Strategis Periklanan di Era Ekonomi Digital”, di Jurnal Pekommas 2 (1), 2017; dan “Interaksi Simbolik dalam Komunitas Virtual Anti Hoaks untuk Mengurangi Penyebaran Hoaks” yang dimuat di Jurnal Pikom (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan) Vol. 19 No. 1 Juni 2018. Email: chri005@kominfo.go.id.

Kheyene Molekandella Boer



Lahir pada 4 Januari 1989, S1 ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, S2 Komunikasi Strategis Universitas Diponegoro Semarang. Aktif dalam club fotografi semasa kuliah, hobi menulis dan memasak. Memutuskan berkarir menjadi pengajar membuat ibu satu anak ini terjun mencicipi beberapa kampus untuk mengajar yakni Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim, STIKOM-

Mahakam dan sekarang ia tetap mengajar di prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman Samarinda Kaltim. Aktif menulis beberapa judul buku yang Ditulis bersama teman teman pengajar dari beberapa kampus yaitu Buku “Ekonomi Politik Media” (Sebuah Kajian Kritis), tahun 2012 diterbitkan oleh penerbit Lingkar Pena. Yogyakarta, Buku “Cyberspace and Culture” (Melihat Dinamika Budaya Konsumerisme, Gaya Hidup dan Identitas Dalam Dunia Cyber), Buku “Public Relations dalam Komunikasi Krisis”, Penerbit Lingkar Media. Aktif menulis di jurnal, proceeding dan mengikuti seminar nasional. Instagram : @kheymolekandella

Lidwina Mutia Sadasri



Lidwina Mutia Sadasri adalah staf pengajar dan peneliti di Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Minat kajian yang ditekuni adalah media baru, kajian selebriti, manajemen media, komunikasi antarmanusia, marketing public relations, dan komunikasi antarbudaya. Lulus S-1 Jurusan Ilmu Komunikasi UGM tahun 2009. Lulus S-2 di jurusan yang sama di tahun 2013. Penulis dapat dihubungi di lidwina.mutia@ugm.ac.id

Rosalia Prismarini Nurdiarti



Rosalia Prismarini Nurdiarti, MA adalah staf pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta sejak 2010. Lahir di Blitar pada 13 Desember 1983, menempuh pendidikan dasar sampai tingkat menengah di Blitar, Jawa Timur. Pendidikan S1 diselesaikan di Ilmu Komunikasi Atma Jaya Yogyakarta pada 2009, lalu melanjutkan jenjang Master di Ilmu Komunikasi FISIP

UGM Yogya hingga tuntas pada 2016. Pada tahun 2017 dan 2018 terlibat dalam hibah DIKTI Penelitian Dosen Pemula, penelitian tersebut berkaitan dengan strategi marketing politik Pilwali Kota Yogyakarta dan Strategi Manajemen Krisis pada lembaga kesehatan, lembaga pendidikan dan industri perhotelan. Berkesempatan dalam riset Hibah Kopertis di tahun 2016 tentang *e-government* di dinas Pariwisata DIY. Artikel yang pernah dipublikasi pada jurnal adalah Representasi Pangan dalam ritual sekaten di Yogyakarta periode 2015-2016. Menulis bunga rampai tentang pemikiran alumni Atama Jaya Yogyakarta pada 2015. Sepanjang perjalanan berkarya di dunia pendidikan, terlibat menjadi narasumber dalam forum ilmiah di tingkat regional dan nasional, serta terlibat dalam pembinaan kader organisasi ekstra kampus. Senantiasa berjuang, berkarya dan hadir dalam kesadaran menjadi spirit yang berusaha dihidupi sepanjang hayat. (Email : rosa@mercubuana-yogya.ac.id)

Arif kusumawardhani



Lahir di Yogyakarta tanggal 24 Juli 1986. Menyelesaikan studi S1 Jurusan Ilmu Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM (2009), Melanjutkan S2 Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol UGM (Lulus 2014). Pernah terlibat dalam beberapa proyek penelitian bertemakan sosial, seperti Survey Kesehatan dan Pendidikan PSKK UGM (2009), Survey Ekonomi-Lembaga Demografi UI (2010), *Rural Urban Migration in China and Indonesia* (2010-2011), Project kerjasama Fisipol UGM - *Australian National University*

bertemakan “Modal Sosial dan Ikhtiar-Bantul Bangkit” (2013) dan beberapa *project* penelitian dari lembaga penelitian *independent*. Turut berkontribusi menulis di jurnal kampus, antara lain: “Membangun Peradaban Bangsa Melalui Budaya Berbagi (Puskombis UMB Jakarta, 2013), “Refleksi Industri Perfilman esek-esek Indonesia dalam konteks etika” (Comicos UAJY, 2013), “Membangun Musik Indonesia Melalui

Budaya Berbagi” (Jurnal Ilmu Komunikasi UAJY, 2014) dan menjadi salah satu penulis di buku yang berjudul *Sport Communication* (2014) serta buku berjudul *Cyberspace and Culture* (2014). Menyukai pertunjukkan musik, videografi dan artikel pop. Saat ini bekerja di salah satu instansi Pemerintah. Bisa dihubungi di aripp.kusuma@gmail.com

Rani Dwi Lestari



Lahir di Magelang, 5 Februari 1986. Lulusan S1 Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi bidang Jurnalistik di UPN Veteran Yogyakarta (2008) dan mendapatkan gelar Master di Universitas Gajah Mada bidang Ilmu Komunikasi dan Media (2015). Memiliki minat pada isu-isu jurnalisme dan media. Pernah menjadi reporter majalah lifestyle natasha magazine sejak 2007-2009 dan menjadi jurnalis di media online Kedaulatan Rakyat (www.krjogja.com) sejak 2009-2015. Aktif dalam

beberapa penelitian dan pengabdian di bidang jurnalisme dan media dan menghasilkan modul pelatihan jurnalisme publik bersama UGM dan Tifa Foundation (2016), riset tentang Komodifikasi Pekerja Media Dalam Industri Televisi Nasional (2016), Legalitas Stringer dan Karya Jurnalistik dalam Media Televisi (2016) dan Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Media Online (2017) serta beberapa riset dan jurnal yang berkaitan dengan jurnalisme dan media. Saat ini aktif sebagai staff pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan konsentrasi pengajaran bidang broadcasting and multimedia journalism. Bisa dihubungi melalui email: aieramharani@gmail.com

Astri Wulandari



Astri Wulandari M.A dilahirkan di Sorong, Papua Barat, pada tanggal 14 Januari 1988. Anak ke 2 dari dua bersaudara pasangan Bapak Sukrianto dan Ibu Yuli Astuti. Ia memulai Pendidikan Sekolah Dasar di SD YPPK Kristus Raja I Sorong, Papua Barat tahun 1993 kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama YPPK St. Don Bosco Sorong, Papua Barat tahun 1999. Lalu di tahun 2002, penulis memutuskan untuk melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Yogyakarta,

SMA Stella Duce I. Pada tahun 2005 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan konsentrasi studi Periklanan. Setelah meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi, penulis melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Gadjah Mada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan konsentrasi studi Ilmu Komunikasi dan Media pada tahun 2011. Saat ini penulis berprofesi sebagai dosen Marketing Communication Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Email : astri@mercubuana-yogya.ac.id

Primada Qurrota Ayun



Primada Qurrota Ayun, S.I.Kom, M.A merupakan dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang sekaligus ibu dari seorang anak perempuan yang berusia 3 tahun. Lulusan S1 Ilmu Komunikasi FISIP Undip tahun 2011 dan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2013. Mengajar beberapa mata kuliah dengan

konsentrasi bidang jurnalistik dan media. Memiliki ketertarikan pada perkembangan teknologi informasi komunikasi. Hobi jalan – jalan dan membaca buku. Bagi yang ingin berdiskusi bisa mengirimkan email ke primadaqa.ayu@gmail.com

Ressi Dwiana



Lahir di P. Berandan pada 16 Maret 1983. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Langkat dan melanjutkan kuliah di Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Utara pada 2001 dan menamatkan kuliah S1 pada Desember 2005. Setelah selesai S1, sejak 2006 hingga 2011, bekerja di beberapa LSM di Nias dan Medan. Ia dan teman-teman juga sempat membuka sebuah peminjaman buku dan taman bacaan bernama Rumah Buku pada April 2007. Pada 2011 ia melanjutkan pendidikannya di S2 Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada. Pada akhir studi masternya mendapat beasiswa penelitian dari Program *In Search in Balance (ISB)* kerja sama UGM dan Universitas Agder Norwegia. Kecintaannya pada dunia traveling membuatnya menghabiskan seluruh uang saku, kemudian gajinya untuk berjalan-jalan, terutama menjelajah nusantara. Merauke dan Sabang sudah ia jalani pada 2010 begitu juga berbagai kepulauan lainnya di Indonesia. Memenuhi niatnya untuk naik Gunung Rinjani pada 2013, melanjutkan misi ke Gunung Himalaya (meski baru sampai Poon Hill) pada Juni 2018 silam, dan berniat untuk menginjak salju Everest kelak saat berhasil menyelesaikan pendidikan doktornya. Oleh karena kegandrungannya pada pariwisata, ia dan beberapa kawan mendirikan Sumatera Wonder Trips pada 2013 silam. Bersama Sumatera Wonder Trips, ia pernah terpilih mengikuti lokakarya yang diselenggarakan oleh British Council pada 2015 silam. Saat ini ia bekerja sebagai staf pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area. Tetapi sejak 2016 melanjutkan studi di S3 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia dan menjadi *awardee* LPDP Budi DN. Fokus penelitian tesis dan disertasinya selalu terkait media komunitas, terutama radio

komunitas. Tetapi ia juga memiliki kecintaannya terhadap berbagai dinamika media baru. Hal ini membuatnya tertarik untuk meneliti dan menulis berbagai fenomena di media sosial, dari yang berbau politik dan serius hingga perkara remeh-temeh anak-anak jaman *now*. Email: ressidwiana@yahoo.com

M. Nastain



Lahir di Kabupaten Semarang 10 Maret 1983. Menyelesaikan studi master komunikasi di Universitas Mercu Buana Jakarta dengan konsentrasi Komunikasi Politik pada tahun 2014. Bergabung dengan Political Communication Institute (PolcoMM Institute) pada tahun yang sama dan melakukan riset-riset social dan politik. Beberapa karya tulis yang pernah dipublikasikan adalah Representasi Jargon Politik PKS (2014),

Transgender Representation in Mass Media (Litera Yogyakarta, 2016), Komunikasi Kultural dalam Akulturasi Budaya Islam dan Jawa (Litera, 2017). Aktifitas saat ini selain sebagai staff pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia Universitas Mercu Buana Yogyakarta juga aktif dalam Pusat Studi Komunikasi dan Literasi (Puskomlit) UMBY. Bisa dihubungi di nastaindongdjates@gmail.com

Didik Haryadi Santoso



Lahir di Kalimantan Barat 6 Juni 1988. Putra ke-3 dari pasangan Drs. Djawadi (Alm) dan Achadiyah, B.A ini menempuh S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan melanjutkan studi pascasarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Ilmu Komunikasi dan Media. Saat ini ia aktif sebagai staf pengajar dan diamanahi sebagai Wakil

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi & Multimedia Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Selain itu, sekarang sedang menempuh program doktoral (S3) di UNS Solo fokus mendalami tentang komunikasi politik, *new media & cyberculture*. Saat ini telah mempublikasi 5 karya buku dan lebih dari 10 karya jurnal nasional terakreditasi hasil dari ragam penelitian ilmiah hibah Kopertis dan hibah Kemenristek Dikti. Hingga sekarang, aktif dalam riset-riset Polcomm Institut dan gerakan literasi media & *new media* serta melakukan riset-riset yang berkaitan dengan *new media & cyberculture*. Selama lebih dari 12 tahun, aktif menjadi murid Mbah Nun (Cak Nun) dan Kiai Kanjeng di Mocopat Syafaat Yogyakarta. Karya ini ia dedikasikan untuk ibu dan almarhum ayah tercinta yang selalu memotivasi untuk menjadi pendidik sebagaimana doa yang almarhum tuangkan dalam nama. Motto hidupnya ialah “beriman, berilmu dan beramal”, “gusti boten sare, urip mung mampir ngombe”. Kontak email: didikharyadi.s@gmail.com